

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Lanal Banten**

Pangkalan Tentara Nasional Indonesia AL Banten atau (Lanal Banten) adalah satuan pelaksana Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut III Jakarta pada jajaran Komando Armada I. Dengan tugas utama dukungan logistik, administrasi, bagi unsur-unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut & melaksanakan pelatihan kiprah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut & melaksanakan pelatihan Potensi Maritim sebagai kekuatan daerah keamanan laut. Wilayah Lanal Banten berada pada Selat Sunda yg adalah jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Secara administratif cakupan wilayah kerja Lanal Banten meliputi 5 Posal (Pos TNI Angkatan Laut) dan 3 Posmat (Pos Pengamat) yang ada di seluruh wilayah Banten.

Dalam hal penjagaan daerah yg sebagaimana yang di lakukan Lanal Banten, batas-batas daerah perairan Selat Sunda merupakan salah satu hal yg sangat penting buat dilakukan penjagaan. Lantaran Selat Sunda merupakan daerah laut yang sangat ramai dan sering untuk dilintasi, baik oleh kapal domestic maupun kapal internasional. Selat Sunda merupakan salah satu selat yang terletak antara pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia. Selat Sunda menghubungkan laut Jawa ke Samudra Hindia. Pada titik tersempit, lebar selat sunda hanya sekitar 25 KM. Selat Sunda termasuk ke dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudera Hindia dengan melalui Selat Karimata. ALKI merupakan hasil dari ratifikasi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 yang dituangkan ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Indonesia memiliki tiga ALKI sebagai jalur lintas kapal asing di daerah

kepulauan Indonesia secara damai. ALKI sendiri dimaksudkan agar pelayaran kapal internasional dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dan secepat mungkin dan juga tidak terhalang dengan daerah teritorial Indonesia yang berupa kepulauan.

Gambar 4.1 Selat Sunda



Sumber (KKP.go.id)

#### 4.1.2 Ancaman di Selat Sunda

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak *chokepoints* laut yang strategis. Pentingnya alur laut Kepulauan Indonesia bagi dunia pelayaran global sudah dijelaskan dalam buku yang dikutip dari *Straits, Passages, and Chokepoints: A Maritime Geostategy of Petroleum Distribution* (Rodrigue, 2004). Hal ini bisa di maklumi, jika melihat fakta di lapangan, maka bisa di lihat bahwa jalur transportasi minyak dan gas bumi untuk kebutuhan energi negara-negara di Asia Timur melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan selat-selat penting bagi negara-negara Asia Timur, terutama bagi Cina dan Jepang.

Selat Sunda yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, dikenal sebagai salah satu jalur lalu lintas laut yang sangat strategis (Forward, 2009), hal tersebut dilihat dari letak Selat Sunda yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura (Nugroho, 2013), sehingga banyak di lalui kapal-kapal besar (UN DOALOS, 2003).

Selat Sunda merupakan jalur pelayaran yang paling strategis yang menjadi perhatian negara-negara adidaya, seperti Amerika, Jepang, dan China. Selat Sunda, Selat Makassar, dan Lombok termasuk di antara *chokepoints* di Dunia Maritim Eurasia (Akimoto, 2001). Selanjutnya, Jean Paul Rodrigue (2004) menjelaskan Selat Sunda merupakan alternatif yang paling efektif apabila pelayaran di Selat Malaka terjadi suatu hambatan pelayaran. Hal tersebut karena Selat Sunda menjadi yang utama karena jalur itu adalah jalur yang terpendek sebagai alternatif dari Selat Malaka. Negara pengguna, seperti Jepang dan China, akan cenderung menggunakan Selat Sunda sebagai perlintasan menuju Samudra Hindia atau sebaliknya karena perbedaan antara Selat Malaka dan Selat Sunda kurang lebih 630 nm atau dua hari perjalanan (Graham, 2006).

Di perspektif lain, Selat Sunda merupakan jalur laut yang menjadi penghubung antara dua pulau terbesar dan terpadat di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, kedua pulau tersebut memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 80% penduduk Indonesia. Kapasitas produksi dan perekonomian yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra memberikan kontribusi sekitar 80% pada GDP Indonesia. Hal ini menunjukkan Selat Sunda juga sangat penting bagi perekonomian Indonesia yang bergantung pada kelancaran lintas barang dan jasa melalui jalur Selat Sunda.

Dari beberapa penjelasan fakta dan data di atas, menunjukkan betapa pentingnya selat sunda bagi pelayaran dunia maupun domestik, atas dasar tersebut, maka keamanan dan pertahanan laut di Selat Sunda merupakan suatu hal yang penting untuk di perhatikan oleh pihak-pihak terkait.

Seperti yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya, Selat Sunda memiliki posisi yang strategis, baik bagi dunia maupun domestik. Dengan strategisnya posisi Selat Sunda maka potensi ancaman juga semakin meningkat. Jalur Selat Sunda yang padat, di tandai dengan tingginya frekuensi kapal laut yang melewatinya. Lalu lintas kapal yang beraktifitas di Selat Sunda kurang lebih 145 kapal per hari dan kurang lebih 53.068 pergerakan kapal per tahun (Dephub.go.id, 2020). Kapal domestik seperti kapal feri roll-on roll-off (roro) melayari Merak dan Bakauheni, hal ini wajar mengingat roda perekonomian yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa berkontribusi terhadap padatnya kapal domestik di Selat Sunda. Tingginya frekuensi kapal feri domestik yang berlayar di Selat Sunda dapat berdampak negatif pada keselamatan, kecepatan, serta keleluasaan kapal internasional yang melintasi jalur ALKI I. Sebagai contoh terkait kepadatan lalu lintas di Selat Sunda adalah saat kapal induk Amerika Serikat, USS George Washington melintasi Selat Sunda dari Laut China Selatan menuju selatan ke Lautan Hindia pada tanggal 6 Juli 2011. Dalam perjalanan menyusuri Selat Sunda tersebut, kapal induk Amerika harus lebih berhati-hati karena tingginya frekuensi lalu lintas kapal disana (Detik.com).

Gambar 4.2 Kepadatan lalu lintas laut di Selat Sunda



Sumber: [hubla.dephub.go.id](http://hubla.dephub.go.id)

Dari gambar di atas, dapat di lihat bahwa Selat Sunda yang di lalui berbagai kapal, baik kapal domestik maupun internasional, hal ini merupakan dampak dari jalur ALKI yang membawa sisi positif dan negatif untuk Indonesia dengan timbulnya benturan antara kepentingan nasional dan internasional terhadap penggunaan Selat Sunda, maka jadi ancaman tersendiri, yang apabila tidak di perhatikan akan mengganggu stabilitas nasional. Berbagai potensi kerawanan keamanan dan pertahanan, baik berupa ancaman militer dari negara lain yang menggunakan Selat Sunda sehingga memunculkan ancaman seperti ancaman lintas negara contoh, penyelundupan narkoba, pembajakan, terorisme, perdagangan manusia (trafficking), dan penyusupan maupun kerawanan lain, seperti pencemaran lingkungan laut, dan gangguan pelayaran dalam negeri.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Pemeliharaan ketertiban serta penegakan hukum yang berhubungan dengan pertahanan negara di perairan selat sunda sudah menjadi kewenangan TNI AL seperti yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, angkatan laut salah satunya melakukan bertugas Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Artinya adalah, untuk kepentingan nasional TNI Angkatan Laut memiliki landasan hukum untuk melakukan pengendalian laut di Selat Sunda.

Narasumber yang telah diwawancarai pada saat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, Komandan Lanal Banten, Pabanops Koarmada I, Paban Ops Guspurla Koarmada 1, Pabanops Lantamal III. Selanjutnya untuk pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian, data yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah, dengan uji triangulasi, melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

### **4.2.1 Hasil Penelitian Tentang Pengendalian Laut Di Selat Sunda**

Pengendalian laut termasuk ke dalam tujuan pertahanan negara mencakup penyelenggaraan perencanaan pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar pertahanan negara di laut sebagai upaya meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan segenap bangsa.

Seperti yang di ketahui, tugas Pokok TNI dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI AL sesuai dengan UU no 34 pasal 9 tahun 2004 Tentang TNI, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- b) Melaksanakan tugas TNI dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c) Melaksanakan tugas TNI untuk tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, seperti yang disampaikan oleh Pabanops Koarmada I pada saat wawancara, bahwa TNI Angkatan Laut memiliki 3 (tiga) Komando Armada yang bertugas:

- a) Komando Armada I Jakarta, memiliki jajaran Pangkalan Utama I (Lantamal I) Belawan, Lantamal II Padang, Lantamal III di Jakarta membawahi Pangkalan Angkatan Laut di antaranya adalah Lanal Banten dan Lampung yang merupakan tempat penelitian, Lantamal IV Tanjung pinang, Lantamal XII Pontianak.
- b) Jajaran Komando Armada II Surabaya, di bawahnya memiliki jajaran Lantamal V Surabaya, Lantamal VI Makassar, Lantamal VII Kupang, Lantamal VIII Manado, Lantamal XIII Tarakan.

- c) Jajaran Komando Armada III Sorong, memiliki jajaran Lantamal IX Ambon, Lantamal X Jayapura, Lantamal XI Merauke, Lantamal XIV Sorong.

Untuk armada kapal (KRI) yang di miliki oleh TNI AL datanya sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Armada Kapal (KRI) TNI AL**

NO	SATUAN/LANT	KOARMADA I	KOARMADA II	KOARMADA III	Jumlah
1	KAPAL ESKORTA	14	20	-	34
2	KAPAL SELAM	-	4	-	4
3	KAPAL SATFIB	7	13	1	21
4	KAPAL SATKAT	12	11	-	23
5	KAPAL SATRAN	2	4	-	6
6	KAPAL SATBAN	2	14	-	16
7	LANTAMAL/SATROL	18	7	8	33
	<b>Jumlah</b>	55	73	9	137

Sumber: Staf Operasi Mabes TNI AL TA. 2020

Selat Sunda merupakan perairan yang termasuk ke dalam ALKI I, di mana dinamika pertumbuhan ekonomi dunia di antaranya terlihat dengan peningkatan armada kapal yang berlayar melalui ALKI I termasuk Selat Sunda. Seperti data wawancara yang peneliti dengan Danlanal Banten, beberapa ancaman yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan IPTEK, maka ancaman seperti smugling, illegal fishing, illegal logging, drugs dan human trafficking pun semakin meningkat, sehingga sangat sulit untuk di lakukan pengawasan di seluruh area, maka TNI AL melakukan operasi rutin sepanjang tahun dengan tujuan menjaga keamanan di laut khususnya di selat-selat yang dianggap strategis agar memudahkan untuk memutus terjandinya ancaman dan gangguan yang menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan, yang mengganggu lalu lintas di selat-selat yang dianggap jalur pelayaran yang sangat penting, antara lain di selat sunda yang merupakan Chokepoints yang strategis. Selanjutnya

disampaikan oleh Pabanops Lantamal III pada saat wawancara, Selat Sunda merupakan Selat yang sangat penting dan termasuk dalam Chokepoints yang dilewati banyak kapal-kapal baik dalam negeri maupun kapal-kapal asing yang lewat di Selat Sunda, sehingga butuh pengawasan yang cukup ketat. Salah satunya membutuhkan kehadiran unsur kapal perang yang berpatroli secara konsisten dan berkelanjutan, guna mencegah terjadinya pelanggaran di laut. Di sini Lantamal III bekerjasama dan berkordinasi dengan Koarmada I dan Guspurla Koarmada I melakukan operasi bersama secara berkelanjutan dan terencana guna menjaga keamanan dan pengendalian laut yang efektif, terukur, terarah dan terencana secara baik, sehingga selat sunda aman dan lalu lintas kapal yang lewat selat sunda berjalan aman dan lancar, tidak ada gangguan atau ancaman yang menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan khususnya di Selat Sunda bahwa banyak potensi kerawanan yang terjadi dan diharuskan melakukan operasi guna terwujudnya pengendalian laut yang baik, hal ini akan berdampak terhadap stabilitas keamanan Kawasan laut Selat Sunda.

Pengendalian laut merupakan kondisi di mana adanya keleluasaan dalam menggunakan ruang laut untuk kepentingan negara, sehingga jalannya kapal untuk kepentingan perdagangan dapat dicapai. Pengendalian laut juga bertujuan untuk mencegah penggunaannya untuk kepentingan asing dalam hal ini pengendalian laut harus mampu menjamin kebebasan navigasi dan bebas dari segala ancaman sesuai dengan UNCLOS 82.

Implementasi pengendalian laut di Selat Sunda merupakan upaya Menangkal potensi ancaman yang hadir di perairan Selat sunda. Dengan demikian, pemanfaatan laut untuk pembangunan kesejahteraan bangsa serta pengamanan kepentingan nasional dan kedaulatan negara dapat dilakukan dengan menerapkan

Strategi Pertahanan Laut dalam kondisi damai dengan mengedepankan strategi penangkalan dan strategi pengendalian.

Pada strategi pengendalian laut, TNI AL menerapkan tiga operasi di Selat Sunda, seperti yang disampaikan oleh Pabanops Koarmada I, “Tiga jenis operasi yang dilakukan yaitu operasi pemutusan garis perhubungan laut lawan, operasi laut sehari-hari di mana seperti yang kita tahu untuk menegakkan keamanan dan hukum di laut, dan juga operasi siaga tempur laut diperuntukkan untuk penangkalan.” (Wawancara 28 Desember 2021).

Danlanal Banten juga mengkonfirmasi operasi tersebut dan menyebutkan bahwa hasil dari operasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Lanal Banten dan juga jajaran Koarmada I dan bahkan TNI AL secara keseluruhan,

“Seperti yang diketahui bahwa wilayah perairan Indonesia sangat luas, jangkakan dari Sabang sampai Merauke, untuk wilayah Selat Sunda saja, operasi pengendalian laut seperti memutus garis perhubungan laut lawan di mana seharusnya ada pengawasan ketat bagi kapal atau orang yang keluar masuk wilayah perairan seringkali kita kekurangan tenaga sumber daya manusia, alutsista dan bahkan teknologi.”

Hal ini dibenarkan oleh Danlantamal III, dalam wawancara personal dengan Peneliti,

“Saat ini Lantamal III hanya memiliki 3 KRI yang mampu melaksanakan operasi pengamanan sampai ke Selat Sunda, dibantu dengan 3 KAL dan 21 Patkamla tetapi dihadapkan dengan luasnya wilayah laut sehingga harus dipergunakan untuk wilayah yang tingkat kerawanannya tinggi”.

#### **4.2.2 strategi pertahanan laut di wilayah Selat Sunda dalam menangkalkan ancaman**

Strategi pertahanan laut di Selat Sunda dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan untuk melaksanakan upaya pertahanan laut di Selat Sunda dalam menghadapi ancaman yang ada dengan menggunakan sumber daya manusia serta peralatan yang ada untuk suatu tujuan menciptakan pertahanan dan stabilitas

keamanan di wilayah Selat Sunda. Strategi pertahanan laut di Selat Sunda harus memperhatikan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai (ends) dan memperhatikan perangkat keras dan lunak yang dimiliki (means) sehingga dapat diperoleh cara dan metode yang sesuai untuk digunakan (ways).

Seperti yang telah di jelaskan pada subbab sebelumnya di perairan Selat Sunda, terdapat wilayah blind spot atau Kawasan yang tidak terawasi karena sifatnya mengawasi bagian perbagian wilayah mengingat kuantitas dan kualitas satuan kapal serta dukungan biaya operasional Angkatan Laut yang masih kurang dan belum maksimal, apalagi dihadapkan dengan kondisi cuaca di mana selat sunda termasuk wilayah perairan bagian selatan terhubung langsung dengan Samudera Hindia, sangat berpengaruh besar terhadap kondisi gelombang perairan di area Selat Sunda, sehingga operasi kapal yang ada saat ini kurang maksimal untuk melaksanakan operasi rutin di saat gelombang besar karena terkendala dengan kondisi alam yang tidak menentu.

Menurut data penelitian dari wawancara dengan Pabanops Koarmada I menjelaskan “strategi pertahanan laut terintegrasi dengan intansi lain dapat memperkuat pertahanan laut di Selat Sunda” Strategi pertahanan laut yang di pakai dalam pengendalian laut di Selat Sunda adalah dengan sistem pertahanan yang terintegrasi yang berfungsi sebagai komponen dan bisa terhubung ke sistem pertahanan negara. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem ini meneruskan informasi kepada unsur-unsur KRI yang melaksanakan di sektor yang telah direncanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI AL. Dibantu oleh pangkalan yang siap sedia membantu kelancaran operasi unsur-unsur KRI diwilayah tersebut apabila ada kendala baik secara teknis maupun non teknis.

Pola operasi rutin dapat dilaksanakan dengan melibatkan satu instansi dalam satu periode operasi atau melibatkan beberapa instansi dalam satu periode operasi, seperti contoh pada operasi periode satu triwulan, dua unsur laut dari TNI AL dan dua unsur laut dari Polairud serta satu heli dari Basarnas. Pola operasi dilaksanakan dengan dua unsur siaga di pangkalan dan dua unsur satu unsur laut di kawasan utara dan satu unsur laut di kawasan selatan Selat Sunda. Pengaturan unsur yang melaksanakan dilaksanakan secara bergantian dengan pola empat hari berlayar dan tiga hari sandar. Unsur yang tidak harus berlayar terus menerus, akan tetapi bisa memantau dengan cara lego jangkar pada posisi yang dianggap rawan terjadi pelanggaran diharapkan dengan kehadiran unsur laut tersebut akan memberi efek penangkalan rasa aman pengguna alur pelayaran di selat sunda.

Selanjutnya dari data penelitian yang di peroleh peneliti dari Pabanops Koarmada I jika ada yang melakukan pelanggaran di Selat Sunda, Pabanops Koarmada I menjelaskan:

“Apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum di perairan selat sunda, kita lihat data pelanggaran yang dilakukan apa oleh kapal tersebut. Apabila bersifat pelanggaran administrasi hanya dikasih teguran dan sanksi adminitrasi saja. Apabila ditemukan pelanggaran pidana maka diproses lebih lanjut sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, masalah penanganan pelanggaran baik kapal dari dalam maupun luar tidak ada perbedaan maksudnya diproses sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dengan berpedoman UNCLOS 82”.

Dari pernyataan di atas, proses hukum yang dilakukan terhadap kapal dalam negeri atau asing sehingga harus ada kerjasama antara instansi yang terkait di laut guna mencegah pelanggaran adalah sama. Maka dari itu, dengan wilayah perairan yang sangat luas tentu sangat sulit untuk diawasi oleh TNI AL sendiri, elemen kerjasama dan koordinasi yang menangani masalah keamanan di Selat Sunda

menjadi hal yang essential. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Danlanal Banten menyatakan bahwa,

“Situasi selat Sunda beberapa tahun belakangan, mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 secara umum dalam keadaan aman dan terkendali, hanya saja masih ditemukan beberapa pelanggaran, potensi ancaman dan kecelakaan yang terjadi di selat sunda. Contohnya, ada beberapa kapal yang mengalami kecelakaan di selat sunda, salah satunya kapal motor penumpang (KMP) mansa nusantara mengalami tabrakan dengan kapal kargo Qihang berbendera kamboja, mengakibatkan terjadinya korban 7 orang meninggal dunia. KM purpik jaya kapal nelayan yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan kapal yang melintas di selat sunda adalah pada waktu melintas mematikan AIS”.

Sedangkan menurut Pabaops Koarmada I

“Pelanggaran yang sering terjadi di selat sunda adalah penyelundupan narkoba, penyelundupan baby lobster, kapal yang melintas tidak menghidupkan AIS dengan cara mengidentifikasinya menggunakan TOC. Setelah itu unsur yang dilapangan melaksanakan pengecekan terhadap kapal-kapal yang dicurigai apabila ditemukan pelanggaran kapal-kapal tersebut ditangkap dibawa ke pangkalan terdekat untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut”.

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di perairan laut Selat Sunda, maka perlu dilaksanakan kegiatan operasi Kamla/Penegakan Hukum sebagai jaminan keamanan pelayaran di laut. Seperti data yang peneliti dapatkan di lapangan saat mewawancarai Komandan Lanal Banten, terkait ancaman yang terjadi di Selat Sunda, Danlanal Banten menjelaskan

Ada beberapa kapal yang mengalami kecelakaan di selat sunda pada medio tahun 2020, salah satunya kapal motor penumpang (KMP) mansa nusantara mengalami tabrakan dengan kapal kargo Qihang berbendera kamboja, mengakibatkan terjadinya korban 7 orang meninggal dunia. KM purpik jaya kapal nelayan yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia sedangkan ancaman dari kapal perang asing di selat sunda adalah pada waktu melintas mematikan AIS saat memasuki perairan Selat Sunda”.

Untuk Mewujudkan strategi pertahanan laut di Selat Sunda perlu dibangun suatu sistem pertahanan laut yang dapat terintegrasi secara menyeluruh wilayah perairan Selat Sunda, salah satunya dengan melakukan koordinasi antar instansi terkait agar pengamanan di Selat Sunda dapat maksimal, efektif dan efisien.

### **4.3 Hasil Pengolahan Data**

Dalam tahap ini, data yang telah diambil dari para informan termasuk dokumentasi, dan sumber literatur diseleksi atau akan dibuang data yang tidak penting dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis atau parameter yang telah ditetapkan melalui teori dan tertuang dalam pertanyaan pada saat wawancara.

#### **4.3.1 Operasi di Selat Sunda**

Selat Sunda yang berada di bawah wilayah tugas Koarmada I, tentunya mempunyai tugas dalam merencanakan dan melaksanakan strategi untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Tentunya strategi yang dibuat merupakan respon terhadap ancaman dan dinamika yang ada. Dari strategi yang telah disusun, kemudian diturunkan menjadi operasi-operasi.

“Di setiap tahunnya, TNI AL menyusun rencana kontijensi yang berisi mengenai Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam rencana kontijensi tersebut, disebutkan prioritas TNI AL dalam menjalankan tugas. Dari rencana kontijensi ini akan diturunkan menjadi rencana rinci (Rencana Rinci) oleh Lantamal untuk dilaksanakan oleh para lanal di bawah jajarannya. Termasuk Lanal Banten.” (Wawancara dengan Pabansops Koarmada I).

Adapun program prioritas TNI AL saat ini, mengikuti prioritas pemerintah pusat yaitu, Pandemi Covid-19. Pabansops Koarmada I menambahkan, “Beberapa tahun terakhir, TNI AL mempunyai prioritas yaitu mencegah penyebaran Pandemi

Covid-19 dan juga membantu dalam pelaksanaan vaksinasi. Akan tetapi, penyelenggaraan operasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan sesuai tugas pokok dan fungsi TNI tetap dijalankan”.

Hal ini juga diakui oleh Danlanal Banten, di kesempatan berbeda juga mengatakan hal yang sama. Berdasarkan Renrinci tersebut baru lah dapat diturunkan operasi-operasi yang dilaksanakan oleh Lanal Banten. Namun, Pandemi Covid-19 masih terus menjadi fokus utama sehingga Lanal juga turut membantu tugas Satgas Covid-19.

Adapun operasi-operasi dalam menjalankan tugas pokok TNI di Selat Sunda, sesuai dengan Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe, disebutkan oleh Danlanal Banten sebagai berikut:

“Operasi patroli sehari-hari tetap dilakukan untuk menjaga wilayah perairan. Operasi gabungan laut dalam rangka kerjasama dengan para stakeholder wilayah Banten seperti Cilegon juga ada. Terakhir di Bulan November lalu kita membuat ‘Merak Kondusif 2021’, operasi ini mengecek dan untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal di wilayah Banten sekitarnya. Operasi ini bekerjasama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kemenkumham Provinsi Banten”.

Banyaknya pabrik di wilayah Provinsi Banten membuat rawannya kejahatan penyelundupan tenaga kerja asing yang melalui jalur perairan yaitu, Selat Sunda. Namun ancaman tidak hanya penyelundupan Tenaga Kerja Asing, tetapi juga penyelundupan baby lobster atau benur yang baru-baru ini berhasil diamankan oleh Lanal Banten.

Selain Lanal Banten yang beroperasi di wilayah Selat Sunda, Lantamal III juga berkoordinasi dan melakukan patroli keamanan dan penegakkan hukum di laut meskipun dengan sumber daya seadanya. Satrol Lantamal III hanya memiliki 3 KRI, 3 KAL dan 21 Patkamla untuk patroli di wilayah Selat Sunda untuk mengawasi

pelanggaran hukum, serta operasi penindakan, penangkapan, baik juga penyelamatan. Oleh karena itu, pemaksimalan penggunaan sarana dan prasarana tersebut hanya di titik-titik wilayah yang dianggap rawan, dapat dikatakan masih banyak titik yang luput dari pengawasan.

Ada beberapa operasi yang dilakukan di wilayah Selat Sunda antara lain; operasi intelijen, operasi teritorial, operasi bakti, dan juga operasi tempur. Dalam operasi intelijen, dibutuhkan kerjasama antar matra dan juga instansi lain yang terlibat dalam pengamanan di wilayah perairan Selat Sunda.

- a. Operasi intelijen seperti pengintaian, pencarian atau pertukaran informasi dilakukan dalam mencegah dan juga mengantisipasi pelanggaran hukum yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan negara.
- b. Operasi teritorial dalam menyiapkan ruang, alutsista yang mendukung untuk menghadapi ancaman.
- c. Operasi bakti, seperti sosialisasi, memberikan vaksinasi Covid-19, memberikan bantuan dalam membangun kawasan pesisir, agar tetap dekat dengan masyarakat pesisir guna mencapai pertahanan dan keamanan yang Tangguh.
- d. Operasi tempur dengan melibatkan seluruh matra untuk mengamankan kedaulatan negara. Menggunakan strategi pertahanan berlapis, sesuai dengan doktrin Jalesveva Jayamahe.

#### **4.3.2 Kekuatan Laut di Selat Sunda**

Dalam perspektif kekuatan laut di wilayah Selat Sunda, kita dapat melihat bagaimana kekuatan laut sebuah wilayah dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kontur tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk serta sifat dari pemerintahan.

Kondisi geografis Selat Sunda sangat unik, wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Selat Malaka. Selat ini menghubungkan Laut Jawa dengan Samudera Hindia dan juga Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Termasuk wilayah ALKI I untuk yang ingin melintas dari atau ke Samudera Hindia sehingga, Selat Sunda termasuk jalur perdagangan dan juga jalur lalu lintas pelayaran dunia.

Untuk kontur tanah dan pantai, Asops Lanal Banten mengatakan bahwa pada Selat Sunda ada titik jarak tersempit. Selain itu adanya Gunung Anak Krakatau dan juga dua gugusan besar terumbu karang, membuat Selat Sunda jalur yang berbahaya namun penuh dengan potensi alam.

“Oleh sebab itu, banyaknya kerawanan yang terjadi adalah kecelakaan pada kapal yang melintas, bencana alam berupa gempa dan tsunami, dan juga pencurian atau penyelundupan sumber daya alam”. (Asops Lanal Banten, wawancara 27 Desember 2021).

Selat Sunda memiliki lebar hingga 110 km, berbatasan di sebelah timur dengan Provinsi Banten, Kabupaten Serang, dan juga Kabupaten Pandeglang. Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sementara untuk kedalaman, Selat Sunda termasuk dangkal sekitar -5 sampai -125 m, sementara di sekitar Gunung Anak Krakatau -180 m.

Kondisi dan juga karakter penduduk sekitar Selat Sunda, sepanjang wilayah pesisir sangat ramai dan juga padat penduduk. Mayoritas penduduk beraktivitas atau menghidupi kehidupan sehari-hari dengan menjadi nelayan, peternak hasil laut, petani, pedagang, dan juga pengusaha di bidang wisata. Kesiapan masyarakat sendiri untuk menghadapi bahaya bencana alam belum atau masih kurang tereduksi. Padahal, masyarakat pesisir ini dapat dilatih untuk membantu tugas TNI

dalam menjaga pertahanan dan keamanan kawasan Selat Sunda jika diberikan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan tindakan pertama atau apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam, ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di Selat Sunda.

Karakter pemerintahan di Selat Sunda, tentunya ikut mendukung dalam mengedepankan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, memang Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten mendukung penuh dalam hal pelestarian dan juga pengamanan Selat Sunda.

“Wilayah Banten ini, komoditas utama pendapatan daerahnya dari wisata dan juga hasil laut. Sehingga, tentu saja pemerintah daerah mendukung penuh upaya TNI dalam mengamankan wilayah laut di sekitar Selat Sunda”. (Gubernur Banten dalam wawancara 27 Desember 2021).

Pertahanan, keamanan dengan ekonomi sangat mempengaruhi satu sama lain sehingga, keduanya bersifat membutuhkan satu sama lain. Pendapatan daerah tentu penting untuk memaksimalkan upaya pertahanan dan juga keamanan di daerah namun tanpa adanya pertahanan dan keamanan, ekonomi juga tidak akan berjalan lancar.

#### **4.4. Interpretasi Data**

Dari hasil wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi yang ada dan telah dikumpulkan serta diolah, Peneliti mempunyai interpretasi tersendiri. Pengendalian laut di Selat Sunda telah dilakukan oleh TNI AL melalui patroli 365 hari dalam setahun namun, masih adanya kekurangan berupa sarana dan prasarana. Penggunaan kekuatan laut juga belum maksimal dilihat dari belum diberdayakannya potensi-potensi yang ada di Selat Sunda.

## **4.5 Pembahasan**

Meningkatnya isu ancaman di jalur perairan Selat Sunda seiring dengan meningkatnya aktivitas dan perdagangan melalui laut, apalagi Selat Sunda termasuk salah satu Selat Strategis. Selat Sunda merupakan bagian dari jalur pelayaran internasional di ALKI I sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang padat, masalah ancaman di jalur tersebut juga ikut meningkat dan kompleks. Peningkatan kompleksitas dan jumlah tindak kejahatan di laut perlu mendapatkan perhatian serius.

Dalam analisis penelitian ini, peneliti akan menjawab dari rumusan permasalahan yang sudah ditetapkan dengan berpedoman kepada data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai pengendalian laut di Selat Sunda.

### **4.3.1 Pembahasan Konsep Pengendalian Laut Di Selat Sunda**

Untuk menganalisis lebih dalam konsep pengendalian di Selat Sunda pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori tentang pengendalian laut, seperti Corbett yang menyebutkan bahwa pengendalian laut yang memiliki dua cara di dalamnya, yaitu dengan cara adanya ketepatan pengambilan keputusan dan blockade (Vego, 2009; Widden, 2012).

Corbett memperjelas teori Mahan dan sekaligus mengoreksinya bahwa menguasai laut secara mutlak akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Untuk dapat mengimplementasikan pengendalian laut di Selat Sunda sesuai dengan teori Corbett, maka dibutuhkan Angkatan Laut yang kuat, Besar dan Profesional.

Menurut penjelasan dari Rear Admiral J.R. Hill dalam bukunya yang berjudul *Maritime Strategy for Medium Powers* mengungkapkan tentang strategi yang harus dilakukan oleh Negara Medium Powers seperti Indonesia dalam rangka sea

command dan sea control (penguasaan dan pengendalian) laut wilayah yurisdiksi nasional negaranya, di mana luas perairan sangat besar dan tidak sebanding dengan jumlah kapal atau armada Angkatan Lautnya, maka strategi yang dianjurkan adalah pengawasan pada selat-selat perbatasan.

Pengendalian laut dilakukan dengan memblokir pelabuhan- pelabuhan strategis, pengawasan selat-selat kunci, dan melindungi armada niaga penting. Pengendalian laut tersebut, ditujukan terhadap lawan dan bakal lawan di mana konflik yang timbul di laut adalah melalui empat media yaitu Atas Air, Bawah Air, Udara dan Luar Angkasa. Hal ini sangat penting di lakukan, mengingat Selat Sunda merupakan salah satu perairan penting di ALKI I. seperti catatan, setiap tahunnya 45 persen dari pelayaran perdagangan dunia melewati Selat Sunda dan (Carana, 2004, hal. 14; US Department of Homeland Security, 2005).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pengendalian laut di Indonesia ditujukan pada sasaran pokok dua spektrum ancaman yaitu kapal atas air dan kapal bawah air. Dengan pilihan strategi ini sangatlah tepat bila keamanan di daerah Selat Sunda merupakan faktor yang sangat penting untuk dijaga.

Aktivitas TNI AL dalam pengendalian, pengamanan dan pertahanan wilayah selat-selat strategis merupakan bagian dari usaha untuk perlindungan dan juga menjaga eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan dan keamanan dari berbagai jenis ancaman. Usaha yang dilakukan oleh TNI AL adalah dengan melakukan operasi patrol rutin yang terencana dan terjadwal di wilayah selat-selat khususnya selat sunda. Zeilinski (2009) menjelaskan Seni operasi angkatan laut (naval operational art) merupakan bagian yang di lakukan oleh Angkatan Laut baik berupa penyiapan praktis maupun praktis yang akan termasuk ke dalam operasi angkatan laut (naval operations) dan aktifitas pertempuran

tersistematis (systematic combat activities/SCA). Dengan kata lain, seni operasi angkatan laut merupakan gabungan dari berbagai bentuk persiapan dan prinsip bagaimana menggunakan berbagai kekuatan dan sarana pertempuran dalam sebuah lingkungan historis nyata.

Operasi yang dilakukan di Selat Sunda bertujuan untuk menjaga keamanan dan melakukan blockade jika ada ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Selat Sunda, menjaga keamanan di Selat Sunda akan berdampak secara signifikan terhadap keamanan ALKI I secara luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Paban Ops Guspurla Koarmada

1, operasi yang menjelaskan. Operasi di Selat Sunda akan berdampak terhadap keamanan di ALKI I, di mana dalam operasi yang dilakukan, Guspurla Koarmada 1 menjadikan 4 kapal yang berpatroli secara rutin di bawah Guspurla Koarmada 1 di wilayah ALKI 1 khususnya di selat sunda ada 1 unsur KRI yang melakukan patroli Guspurla Koarmada 1 juga memonitor kapal-kapal melalui TOC (Tactical Operation Center).

Paban Ops Guspurla Koarmada 1 mengatakan, Guspurla Koarmada 1 dalam pengendalian ALKI 1 khususnya di selat sunda melaksanakan operasi PAM ALKI 1 khususnya di selat sunda operasi sepanjang tahun selama 365 hari di mana beberapa unsur KRI di BKO kan di bawah Guspurla Koarmada 1. Dari hasil wawancara dengan para pejabat tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, operasi yang dilakukan di Sela Sunda akan berdampak secara sistemik terhadap keamanan di ALKI I, konsep ini adalah bagian dari suatu pemahaman mengenai pengendalian laut, yang intinya adalah “kemampuan militer dalam melindungi keamanan negara di laut yang memiliki nilai-nilai esensial terhadap

kepentingan negara dengan menggunakan segala elemen power dan resources yang ada.

Konsep Operasi menurut Paban Ops Guspurla Koarmada 1 yang dibuat untuk pengendalian laut di selat sunda terdapat 2 konsep, yaitu.

1. Pada masa damai:

1) Misi: pengamanan laut di wilayah kerja koarmada 1

2) Tujuan:

- Strategis: terwujudnya efek gentar (Derterence Effect) dan penangkalan terhadap ancaman yang ada.
- Operational: Terwujudnya pengendalian laut (Sea Control) di wilayah kerja koarmada 1

3 Taktis: Pengendalian laut Di ALKI 1

- Kemampuan: Melaksanakan Interdection
- Musuh: Kehadiran di laut memiliki muatan kebijakan politik
- Mengelar / menempatkan kekuatan yang mumpuni operasional dan prosedural dititik-titik rawan.
- Pola durasi 70% unsur KRI melaksanakan operasi dan 30% unsur melaksanakan penetapan kondisi teknis dan perbekalan (bekul) serta standby di pangkalan.

Lebih lanjut, agar pengendalian laut di Selat Sunda dapat terimplementasi secara efektif, maka sarana dan prasarana yang mendukung operasi pengendalian laut harus ditingkatkan agar dapat memiliki kekuatan dan daya tangkal yang tinggi, hal ini sesuai dengan penjelasan Corbett (1982) tentang Pengendalian Laut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keberhasilan pengendalian laut di Selat Sunda sangat bergantung terhadap alutsista yang digunakan.

Dari data yang didapatkan peneliti di lapangan, Kapal yang beroperasi mengawasi wilayah Selat Sunda yang digunakan terdapat jenis kapal cepat dengan panjang 16 meter lebar 3 meter kecepatan 50 Knots seperti kapal Lurssen VSV 15 yang ada di armada barat pangkalan sarana operasi Bea dan Cukai kapal jenis ini sangat cocok untuk dipergunakan di perairan Selat Sunda (Perdana, 2019). Kapal berukuran panjang sampai dengan 30 Pabanameter dilengkapi dengan peralatan pendukung juga cukup efektif.

Untuk sistem pengawasan yang terintegrasi, TNI AL menggunakan teknologi radar sistem pengawasan maritim atau Integrated Surveillance Maritime System (IMSS) yang saat ini sudah terpasang 18 stasiun pengawas pantai Coastal Surveillance Station (CSS), 11 radar berbasis kapal dan pusat pengawasan armada di Jakarta. Tujuan dari penggunaan IMSS adalah untuk mendukung pengawasan pada Selat Sunda secara khusus dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara umum, sehingga dapat mengatur kepadatan lalu lintas kapal di Selat Sunda. Data yang di peroleh, dapat di ketahui radar IMSS punya jarak jangkau efektif sekitar 40 Nautical Mile atau 74 Km. (Adi, 2015).

Namun seperti yang juga telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya, TNI AL masih mempunyai kendala dengan hanya memiliki alutsista yang terbatas, untuk itu, TNI AL memaksimalkan alutsista yang tersedia. Hal ini sesuai dengan data penelitian dari wawancara langsung dengan Paban Ops Koarmada I, TNI AL Melaksanakan pemaksimalan operasi unsur KRI dengan patroli secara terus menerus diselat sunda sesuai dengan prosedur yang ada untuk dipedomi. Dari penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa dalam melakukan pengendalian laut di Selat Sunda, TNI AL memaksimalkan KRI yang sudah di miliki oleh TNI AL. Hal ini

dilakukan secara berkala dan memiliki periode waktu tertentu, sehingga dapat pengendalian laut di Selat Sunda dapat terus dilakukan.

Pada masa perang, tentunya yang dilakukan adalah mencegah musuh dalam menguasai laut. Tentunya, operasi intelijen sudah berjalan lebih dahulu dan bisa membaca atau menganalisis kapan terjadinya konflik atau perang di laut. Dalam proyeksi kekuatan maritim (Till, 2009), dilakukan operasi amfibi dengan berbagai variasi dan juga tujuan yaitu; penyerangan amfibi dengan tujuan untuk membangun kekuatan berperang dan menyandera wilayah pantai; perompakan amfibi dengan tujuan menjadikan tempat tinggal sementara untuk menyusun rencana taktis atau tujuan operasional dalam rencana penarikan pasukan; Penarikan amfibi, kemampuan dalam melakukan ekstraksi pertempuran dan meningkatkan kepercayaan diri pasukan untuk ekspedisi ke daratan; Tipuan amfibi dan demonstrasi, bertujuan untuk menipu musuh dan mengikat kekuatannya agar meningkatkan korelasi kekuatan di tempat lain. Dapat dikatakan bahwa kekuatan laut juga harus memperhatikan kekuatan di darat dan juga udara, sesuai dengan yang dikatakan oleh Mahan.

Dalam melakukan pertahanan, Till (2009) juga menuliskan bagaimana bertahan dari operasi amfibi tersebut. Pertama, penangkalan. Till percaya bahwa semakin menurunnya kepercayaan diri musuh maka akan semakin efektif pengendalian laut dengan penangkalan, meskipun kapal yang dimiliki hanya imajinasi. Ini sesuai dengan konsep strategi pertahanan laut nusantara mengenai penangkalan, dengan Latihan bersama atau operasi bersama, musuh atau negara lain mengetahui bagaimana kapasitas atau kemampuan TNI AL dan menjadi penangkal mereka untuk menginvasi wilayah Indonesia.

Kedua, pertahanan depan tidak langsung. Ini termasuk sulit dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan. Selain strategi, sulitnya menentukan kapal apa dan mana yang ingin dipakai atau dimajukan saat perang juga menjadi dilema. Corbett (dalam Till, 2009) merekomendasikan ketika ada kapal laut yang mencoba invasi wilayah terdeteksi, Corbett meminta untuk menahan serangan sampai musuh 'putus asa untuk berkomitmen untuk melakukan operasi amfibi di luar kemampuannya', hasilnya akan lebih baik daripada penyerangan ofensif.

Ketiga, pertahanan langsung lepas pantai. Beberapa penyerbu, dapat masuk melalui armada terkuat, terutama ketika terbatas pada ukuran atau aspirasi operasional, oleh karena itu perlu memiliki garis akhir pertahanan Angkatan laut di lepas pantai (Till, 2009). Pertahanan dapat dilakukan dengan melakukan serangan terkoordinasi dari kapal selam kecil, serangan cepat, perenang penyerang, seperti upaya Jerman mengusir Normandy di 1944.

Keempat, pertahanan langsung di pantai. Till (2009) mengatakan bahwa ini masih menjadi perdebatan hangat mengenai peran dari Angkatan darat dan Angkatan laut untuk pertahanan pantai. Pertahanan pantai diperlukan karena adanya ketidakpercayaan akan kekuatan pertahanan Angkatan laut.

Di luar keempat cara tersebut, Till (2009) juga menekankan pentingnya untuk memutus komunikasi maritim lawan. Komunikasi maritim di sini juga ada beberapa variasi dengan tujuan. Ada yang untuk menyerang kekuatan militer, merusak ekonomi perang, dan paksaan strategis.

Hasil wawancara sudah menunjukkan adanya pengendalian laut dalam penangkalan. Tetapi dalam taktis bersifat rahasia karena khawatir akan bocor ke pihak musuh. Namun secara garis besar, kita mengetahui bahwa sistem pertahanan berlapis akan dilakukan sesuai dengan Doktrin Jalasveva Jayamahe.

#### **4.3.2 Pembahasan Strategi Pertahanan Laut di Wilayah Selat Sunda dalam Menangkal Ancaman**

Secara umum pelaksanaan pengendalian, pengamanan dan pertahanan laut di Selat Sunda sudah berjalan cukup baik, namun mengingat wilayah Selat Sunda yang harus diawasi cukup luas, sedangkan dukungan sarana prasarana yang ada saat ini di Angkatan Laut masih sangat terbatas, maka dalam pelaksanaan tugas terkait pengamanan dan pertahanan laut di Selat Sunda di butuhkan strategi pertahanan laut yang tepat agar semua area selat sunda dapat terawasi secara berkelanjutan, efektif dan efisien.

Kerja sama antar Lembaga yang terkait dalam keamanan Selat Sunda juga memegang peranan penting. Proses transfer informasi sangat berpengaruh terhadap pengendalian laut, sehingga TNI AL juga di mudahkan dengan adanya koordinasi yang terjalin kontinyu. Seperti data yang peneliti dapatkan, Pabanops Koarmada I menjeleaskan “untuk membuat operasi di Selat Sunda agar efektif dan efisien, TNI AL juga sering menggelar latihan– latihan gabungan unsur-unsur dan instansi di sekitar selat sunda”.

Dalam teori Sea control (Vigo, 2009) dijelaskan tentang Strategi Pengendalian Laut (Sea Control Strategy) yang ditujukan untuk menguasai area laut dan mencegah penggunaan laut oleh lawan. Maka bisa di artikan tujuan strategi pertahanan negara di laut adalah untuk mengendalikan laut, mengontrol laut, penguasaan laut, serta kedaulatan di laut. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maka di TNI terdapat Pusat Komando pengendalian Operasi (Puskodalops) yang salah satu tujuannya adalah untuk pengendalian laut. Salah satu tugas dari Puskodalops sendiri adalah melaksanakan kegiatan Monitoring dan pengumpulan

data kegiatan Operasional, baik di tingkat Mabesal maupun Kotama-kotama, diharapkan terkoordinasi sampai pada tingkat seluruh masalah secara komprehensif tidak parsial dari mulai aspek keamanan, keselamatan pelayaran dan logistik agar wewenang dan bertanggung jawab atas keamanan untuk seluruh aspek geostrategis di Selat Sunda menjadi lebih jelas.

Pusat Komando Pengendalian Operasi dari instansi-instansi yang memiliki kewenangan dan kepentingan di laut, yang secara resmi ikut berpartisipasi dalam pengendalian di laut, lama waktu BKO ditentukan sesuai kebutuhan. Pola pelaksanaan kegiatan operasi direncanakan oleh Staf Operasi di jajaran Koarmada I dan dimonitoring oleh Pusat Komando Pengendalian Operasi (Puskodalops) dalam waktu sepanjang tahun sehingga pelaksanaan operasi akan terjadwal dengan baik.

Operasi yang dilaksanakan di kawasan Selat Sunda akan sangat efektif dan efisien dengan adanya peningkatan kemampuan radar yang terintegrasi mengirimkan informasi ke Pusat Komando Pengendalian Operasi, kemudian dari Pusat Komando Pengendalian Operasi akan menginformasikan kepada unsur kapal yang siaga operasi di pangkalan atau sedang melaksanakan patroli di kawasan Selat Sunda untuk melaksanakan pencegahan atau penanganan permasalahan yang terjadi di selat sunda.

Dengan adanya radar baik di unsur-unsur KRI maupun di pangkalan yang terpasang di sepanjang Selat Sunda dan terintegrasi dengan Pusat Komando Pengendalian Operasi maka penggunaan unsur laut dan udara dalam operasi sifatnya siaga operasi dipangkalan, apabila ada kejadian baru unsur laut digerakkan jenis kapal yang akan digerakkan sesuai kondisi dan kebutuhan, yang didahului oleh unsur udara dengan menggunakan drone untuk deteksi awal posisi kejadian atau jika diperlukan dapat langsung menggunakan unsur udara (Helikopter) untuk

melaksanakan aksi-aksi yang memerlukan penanganan secara cepat, efisien, efektif dan tepat sasaran.